

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan disajikan tinjauan pustaka yang melandasi kerangka pemikiran dan pengujian hipotesis. Penulisan ini akan disajikan sebagai berikut yaitu pertama tinjauan pustaka untuk menggambarkan konsep dasar dari variabel yang diteliti, yang kedua yaitu penelitian terdahulu. Selanjutnya membahas tentang kerangka hipotesis yang menjelaskan tentang model variabel, lalu diikuti dengan hipotesis yang diajukan.

2.1.1 Ketimpangan Pendapatan

2.1.1.1 Pengertian Ketimpangan Pendapatan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, ketimpangan merupakan hal menunjukkan ketidakadilan, tidak beres. Sedangkan menurut Soediyono (1992) pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggota masyarakat dalam waktu tertentu sebagai balas jasa atas faktor-faktor produksi nasional.

Definisi ketimpangan pendapatan seringkali dimaknai sebagai sebuah fenomena dimana terdapat selisih atau gap antara masyarakat ekonomi ke atas dan masyarakat ekonomi ke bawah yang berpihak sebelah. Pada negara berkembang, kekayaan lebih banyak dikuasai oleh masyarakat kelas atas (masyarakat kaya) dibandingkan dengan masyarakat kelas bawah (masyarakat miskin) (Nangarumba, 2015).

Ketimpangan pendapatan merupakan perbedaan jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat, yang mengakibatkan perbedaan pendapatan yang lebih besar antara golongan dalam masyarakat tersebut. Dalam kegiatan ekonomi suatu daerah, ketimpangan merupakan hal yang umum. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan potensi sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi di setiap wilayah, hal tersebut yang menjadikan perbedaan dan menyebabkan ketimpangan yang mendorong proses pembangunan pun menjadi berbeda.

Ketimpangan pendapatan dapat dikatakan suatu kondisi belum meratanya pendapatan yang diperoleh masyarakat dalam suatu daerah bahkan nasional. Menurut (Todaro & Smith, 2003) terdapat tiga faktor yang menyebabkan ketimpangan pendapatan, diantaranya:

- 1) Ketimpangan yang ekstrim/tinggi dapat menimbulkan terjadinya inefisiensi ekonomi

Ketimpangan yang ekstrim dalam pendapatan di suatu wilayah dapat menyebabkan sumber daya yang tersedia tidak dimanfaatkan secara optimal. Hal ini dikarenakan ketimpangan menyebabkan sebagian besar kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang kaya, sementara sebagian besar populasi tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya yang dapat meningkatkan produktivitas ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, dan modal usaha. Akibatnya, kemampuan masyarakat miskin untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi pun terbatas, sehingga potensi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan tidak tercapai.

- 2) Ketimpangan terjadi ketika penduduk berada di atas garis kemiskinan

Ketimpangan pendapatan berlangsung ketika sebagian besar penduduk telah berada di garis kemiskinan. Meskipun kemiskinan absolut dapat diatasi, ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan tetap berlangsung akibat adanya kesenjangan dalam akses terhadap peluang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Masyarakat kelas atas umumnya memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan modal sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan pendapatan yang lebih tinggi. Di sisi lain, masyarakat kelas bawah yang memiliki akses terbatas terhadap pendidikan dan modal yang mengakibatkan pendapatan mereka lebih rendah, hal tersebut yang memperperparah ketimpangan pendapatan.

3) Ketimpangan yang ekstrim/tinggi dianggap tidak adil

Terjadinya ketimpangan di suatu wilayah atau negara seringkali dianggap tidak adil karena bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan distribusi yang merata atas sumber daya ekonomi. Ketimpangan pendapatan menyebabkan kesenjangan kualitas hidup antara masyarakat kelas atas dengan masyarakat kelas bawah. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan sosial yang memicu terjadinya konflik.

Selain itu, ada 8 hal yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan di negara sedang berkembang (Damanik, Zulgani, & Rosmeli, 2018), diantaranya:

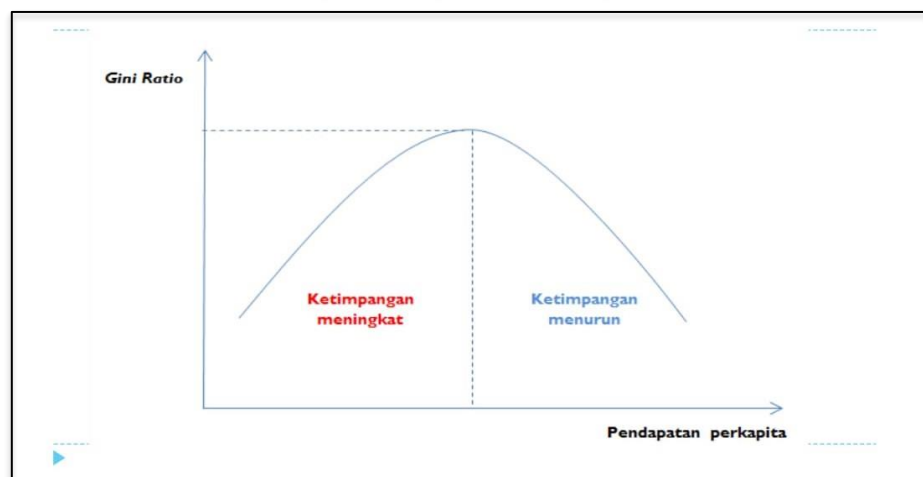
1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita.

2. Inflasi, yang mana pendapatan uang bertambah akan tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan penambahan produksi barang-barang.
3. Ketidakerataan Pembangunan antar daerah.
4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (capital incentive), sehingga persentase pendapatan modal dari kerja tambahan besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah.
5. Rendahnya mobilitas sosial.
6. Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis.
7. Memburuknya nilai tukar bagi negara-negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat ketidak elastisan permintaan negara-negara maju terhadap barang-barang ekspor NSB.
8. Hancurnya industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain.

2.1.1.2 Teori Ketimpangan Pendapatan (Hipotesis Kuznet)

Kuznet (1955) yang menganalisis pertumbuhan historis di negara-negara maju yang mengemukakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi dalam distribusi pendapatan cenderung akan memburuk. Namun pada tahap berikutnya, dalam distribusinya akan membaik. observasi ini dikenal dengan teori kurva “U-Terbalik” karena perubahan dalam distribusi pendapatan akan menurun seiring dengan peningkatan GNP perkapita pada tahap pembangunan kemerosotan

jangka pendek dalam pertumbuhan pendapatan perkapita seiring mengakibatkan ketimpangan yang menajam. Hipotesis Kuznets (kurva U terbalik) dapat dibuktikan dengan membuat PDRB perkapita dan indeks kesenjangan. Grafik tersebut merupakan hubungan antara pertumbuhan PDRB dengan indeks entropy theil selama periode pengamatan. Kurva U terbalik menggambarkan kesenjangan distribusi pendapatan yang meningkat pada tahap awal pembangunan dan menurun pada tahap-tahap berikutnya.



Gambar 2. 1 Kurva U-Terbalik Kuznet

Sumber: Badan Pusat Statistik

Di negara berkembang, pemerataan yang lebih adil merupakan syarat yang menunjang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di negara berkembang harus memiliki syarat adanya pemerataan yang lebih adil karena jika terjadi ketimpangan pendapatan maka akan berdampak negative terhadap pertumbuhan ekonominya. Ketimpangan di suatu wilayah tergantung dari besarnya jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap penerima pendapatan pada wilayah tersebut. Perbedaan penerimaan jumlah pendapatan menimbulkan perbedaan dalam

distribusi pendapatan. Sedangkan besar kecilnya perbedaan tersebut akan menentukan tingkat pemerataan pendapatan daerah tersebut.

2.1.1.3 Pendekatan Perhitungan Ketimpangan Pendapatan

1) Koefisien Rasio Gini (*Gini Ratio Coefficient*)

Koefisien gini merupakan salah satu ukuran yang biasanya digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien gini merupakan salah satu indikator yang menjelaskan distribusi pendapatan secara actual, pengeluaran-pengeluaran konsumsi atau beberapa variabel lainnya yang terkait dengan distribusi yang mana setiap orang menerima bagian yang sama. Sedangkan koefisien gini sendiri diambil dari nama seorang ahli statistik Italia yang bernama Corrado Gini, tahun 1912. Yang mana nilai ukuran koefisien gini berkisar 0 sampai 1.

Hal yang pertama dilakukan dalam perhitungan secara teknis yaitu mengurutkan penduduk dari yang golongan pengeluaran perkapita perbulan terendah dengan penduduk yang mempunyai pengeluaran perkapita perbulan paling tinggi. Lalu dikelompokkan setiap 10 persen dari yang paling rendah sampai paling tinggi. Kemudian menghitung frekuensi persentase dan kumulatif persentase baik untuk penduduk penerima pendapatan maupun pendapatan yang diterima (Badan Pusat Statistik, 2018).

Nilai indeks gini terletak antara 0 sampai 1. Yang mana dapat diartikan bahwa angka 0 (nol) menunjukkan pemerataan yang sempurna, jadi apabila nilai indeks gini mendekati angka 0 maka dapat dikatakan bahwa pemerataan pendapatan di wilayah tersebut merata sempurna. Sebaliknya apabila nilai

indeks gini 1 (satu) menunjukkan ketidakmerataan sempurna, jadi apabila nilai indeks gini mendekati nilai 1, maka dapat dikatakan bahwa pemerataan pendapatan di wilayah tersebut belum sempurna. Berikut formula untuk mencari indeks gini:

$$GR = 1 - \sum f_i [Y_i + Y_{i-1}]$$

Keterangan:

GR = Gini Ratio

f_i = jumlah penerimaan pendapatan kelas-i

Y_i = jumlah kumulatif pendapatan kelas ke-i

Y_{i-1} = jumlah kumulatif pendapatan kelas ke i-1

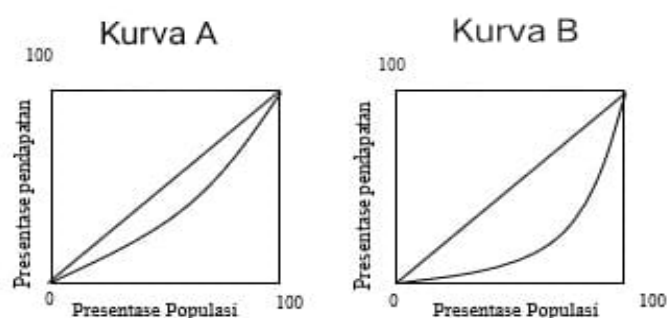
Gini Ratio divisualisasikan melalui kurva Lorenz yang menggambarkan hubungan antara persentase penduduk dengan persentase pendapatan. Gini ratio dihasilkan dengan menghitung luas daerah yang berada di antara garis diagonal (garis pemerataan) dan dibandingkan dengan luas total dari daerah berbentuk segitiga pada bujur sangkar dimana kurva Lorenz berada.

Kurva Lorenz menjelaskan tingkat ketimpangan dengan menampakan area timpang yang dibentuk oleh garis lurus dan lengkung pada kurva. Dengan begitu, fluktuasi angka ketimpangan dari waktu ke waktu ataupun perbandingan antar tempat sulit untuk dibedakan. Ukuran secara kuantitatif diperjelas dengan perhitungan indeks gini.

Menentukan tingkat ketimpangan kurva Lorenz yaitu dengan melihat jauh atau dekatnya garis lengkung terhadap garis diagonal (garis pemerataan

sempurna), semakin dekat antara garis lengkung dengan garis diagonal, maka dapat dikatakan ketimpangan yang terjadi semakin merata. Begitupun sebaliknya, apabila semakin jauh garis lengkung dengan garis diagonal, maka dapat diartikan distribusi pendapatan semakin timpang atau tidak merata, atau dengan kata lain apabila ketimpangan semakin tinggi maka bentuk kurva Lorenz akan semakin lengkung mendekati sumbu horizontal bagian bawah.

Dua bentuk kurva Lorenz yang melambangkan kondisi distribusi pendapatan yang jauh berbeda dapat dilihat dari gambar 2.2 di bawah, kurva a menunjukkan suatu distribusi pendapatan yang relatif merata, sedangkan kurva B menunjukkan suatu distribusi pendapatan yang relatif tidak merata.



Gambar 2. 2 Kurva Lorenz

Sumber :Ruang Guru

Kriteria untuk menentukan apakah pola pengeluaran suatu masyarakat dikatakan rendah, sedang, ataukah tinggi, sebagai berikut:

- Ketimpangan taraf rendah, apabila $G < 0,3$
- Ketimpangan taraf sedang, apabila G antara $0,3-0,5$
- Ketimpangan taraf tinggi, apabila $G > 0,5$

2) Ketimpangan Relatif (*Relative Inequality*) Kriteria Bank Dunia

Pusat penelitian Bank Dunia (*World bank*) mengemukakan ukuran yang dapat memberikan Gambaran yang lebih jelas mengenai masalah ketimpangan melalui indicator ketimpangan relative kriteria bank dunia. Ketimpangan relative merupakan ketimpangan dalam distribusi pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan masyarakat.

Pengelompokkan penduduk berdasarkan besarnya pendapatan menurut Bank Dunia ada tiga, yaitu:

- 40 persen penduduk dengan pendapatan rendah, yaitu apabila proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen.
- 40 persen penduduk dengan pendapatan menengah, yaitu apabila proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen.
- 20 persen penduduk dengan pendapatan tinggi, yaitu apabila proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen.

2.1.2 Kemiskinan

2.1.2.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan keadaan di mana terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan juga merupakan suatu permasalahan yang tidak hanya dialami oleh negara berkembang namun juga dialami oleh negara-

negara maju. Menurut (Ritonga, 2003), kemiskinan merupakan kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang sehingga tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya. Kebutuhan dasar minimal yang dimaksud adalah kebutuhan pangan, sandang, papan dan kebutuhan sosial. Kemiskinan terjadi karena sumber daya manusianya yang rendah dan, akses kegiatan perekonomian yang belum maksimal, dan belum meratanya pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang selalu ada dalam suatu negara atau daerah di mana permasalahan ini berkaitan dengan produktivitas, produksi dan konsumsi dalam perkembangan masyarakat atau individu sebagai suatu wujud dari kebijakan pemerintah.

Berdasarkan teori Nurkse menggambarkan dalam teori lingkaran kemiskinan bahwa keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal dapat mengakibatkan rendahnya produktivitas manusia. Rendahnya produktivitas manusia akan mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan yang diterima akan berakibat pada rendahnya tabungan dan rendahnya investasi. Investasi berupa investasi sumber daya manusia yaitu dengan ukuran pendidikan, maupun investasi capital dengan ukuran konsumsi. Berdasarkan teori lingkaran kemiskinan tersebut dapat diketahui ada beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan diantaranya tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan besarnya konsumsi.

Menurut (Tambunan, 2019) kemiskinan dapat digolongkan dalam beberapa kategori yaitu:

1. Kemiskinan absolut adalah derajat kemiskinan di bawah, di mana kebutuhankebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat terpenuhi. Hal ini merupakan suatu ukuran tetap dalam bentuk kebutuhan minimum ditambah komponen non makanan yang juga sangat diperlukan.
2. Kemiskinan relatif, adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan dalam distribusi pendapatan, dapat didefinisikan dalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi pendapatan. Di negara-negara maju, kemiskinan relatif diukur sebagai suatu proporsi dari tingkat pendapatatan rata-rata perkapita sebagai suatu ukuran relatif, kemiskinan relatif dapat berbeda menurut negara atau periode di dalam suatu negara.
3. Kemiskinan alamiah disebabkan oleh rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan sumberdaya alam. Dalam kondisi tersebut, peluang untuk melakukan dan meningkatkan produksi relatif kecil dan tingkat efisiensi produksinya relative rendah.
4. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh budaya penduduk yang malas, tidak mau kerja keras, etos kerja sangat rendah, tidak disiplin dan sebagainya.

2.1.2.2 Penyebab Kemiskinan

Menurut (Itang, 2015) dalam penelitiannya menyebutkan penyebab kemiskinan terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor ekstern dan faktor intern.

a) Faktor Intern

- (1) Sikap, suatu keadaan jiwa dan keadaan yang dipersiapkan untuk memberikan tanggapan terhadap suatu objek yang diorganisasi melalui pengalaman dan mempengaruhi secara langsung melalui perilaku.
- (2) Pengalaman dan pengamatan. Pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan sosial dalam tingkah laku. Pengalaman dapat diperoleh dari tindakan dimasa lalu dan belajar. Hasil dari pengalaman akan membentuk pandangan terhadap suatu objek.
- (3) Kepribadian. Kepribadian adalah karakteristik individu dan cara berperilaku yang menentukan perbedaan perilaku dari setiap individu.
- (4) Konsep diri. Konsep diri sebagai inti dari pola kepribadian akan menentukan perilaku individu dalam menghadapi permasalahan hidupnya, karena konsep diri merupakan frame of reference yang menjadi awal perilaku.
- (5) Motif. Perilaku individu muncul karena adanya motif kebutuhan untuk merasa aman dan kebutuhan terhadap prestise. Jika motif seseorang terhadap kebutuhan akan prestise itu besar maka akan membentuk gaya hidup yang cenderung hedonis.
- (6) Persepsi adalah proses dimana seseorang memilih, mengatur dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk suatu gambar yang berarti mengenai dunia.

b) Faktor Ekstern

- (1) Kelompok referensi. Kelompok yang memberikan pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. Pengaruh tersebut akan menghadapi individu pada perilaku dan gaya hidup tertentu.
- (2) Keluarga. Keluarga memegang peranan terbesar dan terlama dalam pembentukan sikap dan perilaku individu. Hal ini karena pola asuh akan membentuk kebiasaan yang secara tidak langsung mempengaruhi pola hidupnya.
- (3) Kelas sosial. Sebuah kelompok yang relatif homogeny dan bertahan lama dalam sebuah masyarakat, yang tersusun dalam sebuah urutan jenjang, dan para anggota dalam setiap jenjang itu memiliki nilai, minat, dan tingkah laku yang sama.
- (4) Kebudayaan. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normative, melalui ciri-ciri pola pikir, merasakan dan bertindak.

2.1.3 Penanaman Modal Asing

Menurut (Sukirno, 2016) investasi merupakan penanaman modal yang dikeluarkan dengan tujuan untuk membelanjakan barang-barang modal serta persediaan produksi guna meningkatkan kemampuan produksi barang dan jasa yang tersedia dalam suatu perekonomian guna mencapai keuntungan. Pengertian investasi menurut KBBI adalah penanaman modal di suatu perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan investasi (Mankiw, 2006)

didefinisikan sebagai barang-barang yang dibeli oleh individu ataupun perusahaan untuk menambah persediaan modal mereka.

Penanaman modal asing dapat diartikan sebagai pengeluaran atau usaha penanaman modal atau usaha untuk membeli barang dan perlengkapan produksi untuk memenuhi kebutuhan memproduksi suatu barang dan jasa (Sukirno, 1997). Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia merupakan bentuk minat dan harapan dari investor terhadap pertumbuhan serta pengembangan Indonesia di masa depan. Pandangan positif para investor tersebut terhadap Indonesia diwujudkan dengan berinvestasi pada sektor-sektor yang dianggap produktif dan hal ini tentunya akan meningkatkan putaran kegiatan ekonomi keseluruhan.

Menurut (Kairupan, 2013) penanaman modal asing menjadi salah satu sumber pendanaan luar negeri yang strategis dalam menunjang pembangunan nasional, khususnya dalam pengembangan sektor riil yang pada gilirannya diharapkan akan berdampak pada pembukaan lapangan kerja secara luas. Pentingnya peranan penanaman modal asing dalam pembangunan ekonomi Indonesia juga terefleksi dalam tujuan yang tertera dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal (UU penanaman Modal) sebagai dasar hukum kegiatan penanaman modal di Indonesia.

Dalam teori ekonomi, investasi berarti pembelian (dan produksi) dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang. Dalam pembangunan ekonomi, investasi memiliki dua peran penting, pertama peran dalam jangka pendek berupa pengaruh terhadap permintaan agregat yang

akan mendorong peningkatan output dan kesempatan kerja. Kedua, investasi menambah berbagai peralatan, mesin bangunan dan lainnya, dalam jangka Panjang hal ini akan meningkatkan potensi output dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian secara kontinu (Mappadang, 2021).

2.1.4 Upah Minimum Provinsi

2.1.4.1 Pengertian Upah Minimum Provinsi

Menurut pasal 3 peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi no 7 tahun 2013 upah minimum adalah kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan upah minimum provinsi merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok serta tunjangan yang berlaku pada cakupan wilayah provinsi serta ditetapkan oleh gubernur sebagai jaringan pengaman. Upah minimum Provinsi merupakan upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di dalam satu Provinsi. Upah minimum merupakan standar minimum yang umumnya digunakan oleh pengusaha atau pelaku industri untuk memberi upah kepada para pegawai, buruh ataupun karyawan di dalam lingkungan kerjanya.

Variabel yang menjadi bahan pertimbangan penetapan upah minimum yaitu diantaranya kebutuhan hidup layak, indeks harga konsumen, kemampuan dan kelangsungan perusahaan, upah yang berlaku pada umumnya di daerah lain, kondisi pasar kerja, tingkat perkembangan ekonomi dan pendapatan perkapita, produktivitas tenaga kerja, dan usaha marginal.

Berbagai teori dikemukakan oleh para ekonom modern mengenai penentuan upah. Menurut subsistence theory upah cenderung mengarah kesuatu Tingkat yang

hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum pekerja dan keluarganya. *Wages fund theory* menerangkan bahwa upah tergantung pada permintaan dan penawaran tenaga kerja. *Residual claimant theory* menyatakan bahwa upah adalah sis a jika seluruh imbalan bagi faktor produksi yang lain telah dibayarkan. Menurut *marginal productivity theory* menyatakan dalam kondisi persaingan sempurna setiap pekerja yang memiliki skill dan efisiensi yang sama dalam suatu kategori akan menerima upah yang sama dengan VMP (Value Of Marginal Product) jenis pekerjaan yang bersangkutan. Artinya tidak ada kesepakatan antara para ahli ekonomi mengenai masalah bagaimana upah itu ditetapkan.

2.1.4.2 Formula Penetapan Upah Minimum Provinsi

Formula penetapan upah minimum Provinsi dihitung dengan:

$$UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflasi} + \% \Delta PDB_t)\}$$

Keterangan:

UM_n = Upah minimum yang akan ditetapkan

UM_t = Upah minimum tahun berjalan

Inflasi = Inflasi yang dihitung dari periode September tahun lalu sampai dengan periode September tahun berjalan

ΔPDB_t = Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari pertumbuhan PDB yang mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan II tahun berjalan

2.1.5 Produk Domestik Regional Bruto

2.1.5.1 Pengertian PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan data statistik yang merangkum perolehan nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah pada satu periode tertentu (Astuti & Hukom, 2023). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB dapat didefinisikan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha yang dihasilkan dalam suatu wilayah /daerah/region tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB merupakan salah satu indikator terpenting untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu wilayah pada periode tertentu, baik berdasarkan harga konstan maupun atas dasar harga berlaku. PDRB ADKB menjelaskan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun untuk melihat pergeseran struktur ekonomi. Sedangkan PDRB ADHK menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada suatu tahun tertentu sebagai dasar untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada satu periode ke periode lainnya (BPS Kota Surakarta, 2021).

Produk Domestik Regional Bruto sebagai salah satu indikator ekonomi memuat berbagai instrument ekonomi yang di dalamnya terlihat jelas keadaan makro ekonomi suatu daerah dengan pertumbuhan ekonominya, pendapatan perkapita dan berbagai instrument ekonomi lainnya. Dimana dengan adanya data-data tersebut akan sangat membantu pengambil kebijakan dalam perencanaan dan evaluasi sehingga pembangunan tidak salah arah. PDRB dapat digunakan sebagai

alat ukuran pertumbuhan yang lebih baik dalam mencerminkan kesejahteraan penduduk pada suatu wilayah. PDRB merupakan tolak ukur pertumbuhan ekonomi di lingkup wilayah Provinsi dan kabupaten.

2.1.5.2 Pendekatan perhitungan PDRB

Perhitungan PDRB diperoleh melalui tiga pendekatan:

a) Pendekatan Produksi

PDRB menurut pendekatan produksi merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun. Unit-unit produksi dalam penyajiannya dikelompokkan dalam 17 sektor atau lapangan usaha, diantaranya:

- 1) Pertanian, kehutanan, dan perikanan
- 2) Pertambangan dan penggalian
- 3) Industri pengolahan
- 4) Pengadaan Listrik dan gas
- 5) Pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang
- 6) Konstruksi
- 7) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
- 8) Transportasi dan pergudangan
- 9) Penyediaan akomodasi dan makan minum
- 10) Informasi dan komunikasi
- 11) Jasa keuangan dan asuransi
- 12) Real estate

13) Jasa Perusahaan

14) Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib

15) Jasa Pendidikan

16) Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial

17) Jasa lainnya.

b) Pendekatan pendapatan

PDRB menurut pendekatan pendapatan merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. PDRB pendekatan pendapatan juga mencakup penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

c) Pendekatan pengeluaran

PDRB menurut pengeluaran merupakan semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari:

(1) Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga

(2) Pengeluaran konsumsi akhir Lembaga non-profit yang melayani rumah tangga

(3) Pengeluaran akhir konsumsi pemerintah

(4) Pembentukan modal tetap domestik bruto

(5) Perubahan inventori

(6) Ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

2.1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka

2.1.6.1 Pengertian Tingkat Pengangguran Terbuka

Menurut (Sukirno, 2006) pengangguran merupakan seseorang yang digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu Tingkat upah tertentu, akan tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Sedangkan menurut Badan pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran merupakan penduduk berusia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan (Marini & Putri , 2019).

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah ukuran yang menunjukkan besarnya penduduk usia kerja yang termasuk ke dalam kelompok pengangguran, atau lebih singkatnya tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja (Direktorat Statistik Kependudukan dan ketenagakerjaan, 2021).

Menurut teori Malthus mengatakan bahwa pada masyarakat modern dapat diartikan semakin pesatnya jumlah penduduk menghasilkan angkatan kerja yang semakin banyak, namun tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang ada karena jumlah kesempatan kerja semakin sedikit kemudian antar individu satu dengan yang lain saling bersaing untuk memperoleh pekerjaan dan yang tersisih dalam persaingan akan menjadi golongan penganggur. Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang memengaruhi manusia secara langsung dan merupakan yang paling berat.

Menurut (Sukirno, 2006) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran antara lain:

1. Besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Hal ini terjadi saat jumlah Angkatan kerja lebih banyak daripada jumlah kesempatan kerja yang tersedia.
2. Struktur lapangan kerja yang tidak seimbang.
3. Kebutuhan jumlah dan jenis tenaga kerja terdidik dan penyediaan tenaga kerja terdidik tidak seimbang.
4. Meningkatnya peranan dan aspirasi angkatan kerja wanita dalam seluruh struktur angkatan kerja Indonesia.
5. Penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang.

2.1.6.2 Perhitungan Tingkat Pengangguran terbuka

Untuk mengetahui tingkat pengangguran terbuka di setiap provinsinya, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPT (\%)} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100$$

Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan banyaknya pengangguran terhadap 100 penduduk yang masuk kategori angkatan kerja. Pengangguran terbuka pada dasarnya adalah konsep seluruh angkatan kerja yang mencari pekerjaan, baik yang mencari pekerjaan pertama kali maupun yang sudah bekerja sebelumnya.

2.2 Penelitian terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Peneliti, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Analisis Pengaruh Tingkat PDRB PerKapita, Indeks Pembangunan Manusia, dan Penanaman Modal Asing terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia periode tahun 2019-2021 (Miftahul Janah, 2022)	Penanaman Modal Asing	IPM, tingkat PDRB perkapita	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDRBPKP berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan, IPM berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan, dan PMA berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia periode 2019-2021.	Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (e-ISSN: 2963-5292; p-ISSN: 2963-4989, Hal 23-44)
2	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan (Ahmad Helmy, Syamsu Nujumu, Abbas Selong, 2024)	Upah minimum	Pertumbuhan Ekonomi, IPM	Secara parsial pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, upah minimum berpengaruh positif, dan IPM berpengaruh negatif.	SEIKO : Journal of Management & Business ISSN: 2598-831X (Print) and (ISSN : 2598-8301)

No	Judul, Peneliti, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Dampak IPM, tingkat pengangguran dan kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Bagian Selatan (Muhammad Ersad, Amri Amir, Zulgani, 2022)	Tingkat Pengangguran, Kemiskinan	IPM	Hasil menunjukkan Secara parsial variabel IPM dan tingkat kemiskinan tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan, sementara dari variabel penelitian hanya Tingkat Pengangguran berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan.	Jurnal Paradigma Ekonomika, ISSN: 2085-1960
4	Analisis faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia (Eko Nursahid, Priyagus, dan Sri Minantri, 2018)	Investasi, Upah Minimum	IPM, tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi	Hasil menunjukkan ketimpangan pendapatan dipengaruhi oleh investasi, pertumbuhan ekonomi, dan upah regional yang memiliki pengaruh secara positif dan signifikan, Tenaga kerja mempengaruhi ketimpangan tetapi tidak signifikan, IPM berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan.	Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM);3 (1),2018 https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIEM
5	Analisis determinan ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa tahun 2015-2022 (Pasoman, Nugroho Sumarjiyano	PDRB, Upah Minimum Provinsi	Jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka, IPM	Hasil menunjukkan ketimpangan pendapatan dipengaruhi oleh variabel PDRB yang memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan, variabel jumlah penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan, variabel IPM dan TPT berpengaruh positif dan	BISECE R (Business Economic Entrepreneurship) PISSN:2599-3097 E-ISSN:2714-9986

No	Judul, Peneliti, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Benedictus Maria, 2024)			signifikan, UMP berpengaruh negatif dan signifikan.	
6	Pengaruh Penanaman Modal Asing, Indeks Persepsi Korupsi, Kemiskinan, Pengangguran dan Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia (Kasman Karimi, Pertiwi Mulyani, Neng Murialti, Tibrani , 2023)	Penanaman Modal Asing, Penganggur an, Upah minimum	Kemiskina n, Indeks persepsi korupsi	Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa Penanaman Modal Asing, Indeks Persepsi Korupsi, Kemiskinan, Pengangguran, dan Upah Minimum berpengaruh positif signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia.	Jurnal Akuntansi dan Ekonomi ka
7	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kalimantan Selatan (Verry Noval Ariadi, Muzdalifah, 2020)	Penganggur an, kemiskinan	Pertumbuh an ekonomi	Penelitian ini memiliki hasil yang menyatakan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan, Pengangguran berpengaruh signifikan, dan Kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.	JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembang unan, ISSN 2746- 3249

No	Judul, Peneliti, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur Pada tahun 2011-2019 (Andhika Bhagaskara, 2023)	Upah minimum, Investasi	Angkatan kerja, Pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan, sementara upah minimum, indeks pembangunan manusia, pengeluaran pemerintah, dan investasi memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.	Journal of development economic and social studies
9	Analisis Pengaruh PDRB, IPM Dan Tenaga Kerja Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Kalimantan Tengah (Devi Astuti dan Alexandra Hukom, 2023)	PDRB	IPM, tenaga kerja	Disparitas pendapatan tidak dipengaruhi secara signifikan oleh variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sedangkan variabel tenaga kerja berpengaruh secara signifikan terhadap Ketimpangan pendapatan.	OPTIMAL : Jurnal Ekonomi dan Manajemen (e-ISSN: 2962-4010; p-ISSN: 2962-4444, Hal 73-84)
10	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Lima Kabupaten/Kota Di Bolaang Mongondow Provinsi	Kemiskinan	Pertumbuhan Ekonomi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Variabel kemiskinan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi

No	Judul, Peneliti, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sulawesi Utara (Resha M.A Kunenengan, Daisy S.M Engka, Ita Pingkan F. Rorong, 2023)				
11	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Kota Tanjungpinang	Upah Minimum Dan Tingkat Pengangguran	Pertumbuh an ekonomi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan upah minimum memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan tingkat pengangguran memiliki pengaruh positif signifikan	Jurnal Manajeri al dan Bisnis Tanjungp inang
	(Anggia Sekar Putri, Seftia Anggraini, 2024)				
12	Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Upah Minimum Kabupaten, Pengangguran, dan IPM Terhadap Ketimpangan Pendapatan Kab/Kota di Provinsi Bali Pada Tahun 2015-2022	Upah Minimum	Jumlah penduduk, Pengangu ran, IPM	Hasil menunjukkan bahwa Upah minimum dan jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan, IPM dan pengangguran memiliki pengaruh positif dan sgnifikan	PRIMAN OMICS : Jurnal Ekonomi dan Bisnis (https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ds)

No	Judul, Peneliti, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(Agam Firdaus dan Maulidyah Indira Hasmarini, 2023)				
13	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Asing, Inflasi, dan Trade Openness terhadap Ketimpangan di Indonesia Tahun 2000- 2020 (Erni Sri Wijayanti, Siti Aisyah , 2022)	Investasi Asing	Inflasi, Trade Openness, pertumbuh an ekonomi	Hasil penelitian menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi asing berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan, Trade Openness berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan, sementara inflasi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.	Ekonomi s: Journal of Economi cs and Business, ISSN 2597- 8829
14	Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 – 2018 (Istikharoh, Whinarko Juli Priyanto, Rian Destiningsih , 2020)	Upah Minimum Dan Tingkat Pengangguran	Tingkat Pendidikan	Hasil menunjukkan tingkat Pendidikan dan upah minimum mempunyai pengaruh positif dan signifikan, sedangkan tingkat pengangguran berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.	DINAMI C : Directory Journal of Economi c

No	Judul, Peneliti, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	Dampak IPM, tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Bagian Selatan (Muhammad Ersad, Amri Amir, Zulgani, 2022)	Tingkat pengangguran	IPM, tingkat kemiskinan	Secara parsial variabel IPM dan tingkat kemiskinan tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan, sementara dari variabel penelitian hanya Tingkat Pengangguran berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan .	Jurnal Paradigma a Ekonomika (ISSN: 2085-1960)

2.3 Kerangka pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan konsep dari sebuah penalaran yang mampu memberikan jawaban sementara dari rumusan masalah yang telah dijelaskan. Mengacu pada teori yang ada, peneliti, garis besar penelitian ini yaitu melihat hubungan antara kemiskinan, penanaman modal asing, Upah minimum Provinsi (UMP), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan di 34 Provinsi di Indonesia tahun 2018-2023.

2.3.1 Hubungan Kemiskinan dengan Ketimpangan Pendapatan

Teori ekonomi klasik yang dikemukakan oleh Kuznet (1955), mengemukakan bahwa pada tahap awal pembangunan ekonomi, ketimpangan pendapatan cenderung meningkat karena sebagian kecil populasi mengambil keuntungan lebih besar dari pertumbuhan ekonomi, sementara sebagian besar

lainnya tetap berada dalam kemiskinan. Akan tetapi, ketika perekonomian terus berkembang dan terjadi redistribusi kekayaan, ketimpangan tersebut diharapkan berkurang. Namun, kenyataan di banyak negara berkembang menunjukkan bahwa ketimpangan sering kali tetap tinggi, bahkan ketika terjadi pertumbuhan ekonomi, dan hal ini memperburuk kemiskinan di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah.

Hal ini sejalan dengan temuan dari (Wilkinson & Pickett, 2009) yang menunjukkan bahwa negara-negara dengan ketimpangan pendapatan yang lebih rendah cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang rendah serta kualitas hidup yang lebih baik. Hal tersebut karena dengan ketimpangan pendapatan yang tinggi maka akan menciptakan lingkaran setan kemiskinan. Semakin tinggi tingkat kemiskinan maka semakin tinggi pula tingkat ketimpangan. Tidak tercapainya pengurangan yang berarti pada angka kemiskinan mengakibatkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan dalam negara berkembang semakin meningkat (Harianty & Soetojo, 2019). Oleh sebab itu, penurunan angka kemiskinan sangat diperlukan, agar ketimpangan dimasyarakat semakin berkurang.

Menurut (Laibson & Acemoglu, 2019) alasan mengapa banyak pembuat kebijakan dan masyarakat khawatir akan ketimpangan pendapatan adalah karena kaitannya dengan kemiskinan. Kemiskinan yang ekstrem akan menyebabkan permasalahan ekonomi, Kesehatan, dan juga pendidikan. Menurut (Riandi, 2020) masalah ketimpangan sangat ditentukan oleh kemiskinan. Tingkat kemiskinan menjadi patokan yang utama dalam menurunkan angka ketimpangan pendapatan. Miskin dapat diartikan sebagai individu yang tidak dapat memenuhi kebutuhan

sehari-hari karena kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan menabung untuk masa depan tidak mungkin ada. Kemiskinan menjadi pemicu utama terjadinya ketimpangan pendapatan itu sendiri, dengan meningkatnya kemiskinan maka akan meningkat pula ketimpangan pendapatan.

2.3.2 Hubungan Penanaman Modal Asing dengan Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan teori Harrod Domar yang menjelaskan bahwa investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka panjang. Kurangnya investasi di suatu wilayah menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat rendah disebabkan karena kurangnya kegiatan ekonomi yang produktif di wilayah tersebut. Ketika investasi hanya berpusat di suatu wilayah tertentu, maka akan menyebabkan ketimpangan pembangunan dan terhambatnya pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya menyebabkan timpangnya distribusi pendapatan.

Investasi asing menyebabkan suatu negara dapat meningkatkan output manufaktur berorientasi eksportnya, serta dapat menurunkan jumlah impor. Sebagai komponen penting dalam globalisasi, investasi asing kemungkinan dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan di negara tuan rumah. Di sisi lain, meskipun investasi asing memberikan peran penting dalam memajukan pembangunan ekonomi, hal itu juga bertanggung jawab atas memburuknya ketimpangan pendapatan, misalnya dengan memperparah perbedaan upah di negara tuan rumah dan repatriasi laba Perusahaan FDI ke negara asal (Wairooy & Haryono, 2023).

Investasi yang dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan. Banyaknya investasi yang terpusat di beberapa daerah mengakibatkan terjadinya ketimpangan, karena tidak menuntut kemungkinan investasi di satu daerah sangat tinggi dan daerah lainnya rendah. Karena alasan investor menanamkan modalnya ialah melihat potensi sumber daya alam, infrastruktur, keamanan, kemudahan birokrasi dan kepastian informasi yang dimiliki oleh daerah sehingga menyebabkan nilai investasi yang berbeda atau timpang di setiap daerahnya (Royan, Riyanto, & Nuraini, 2019).

Sama halnya dengan investasi asing yang terjadi di Indonesia, sebagian modal asing terkonsentrasi hanya di beberapa daerah saja, bahkan di beberapa daerah nilai investasinya sangat rendah, karena investor asing hanya tertarik pada daerah yang memiliki potensi keuntungan. Ada dua model ketidaksetaraan, teori Harrod Domar dan teori neo klasik, kedua teori tersebut memberikan peran yang khusus terhadap modal, yang dapat direpresentasikan dengan berinvestasi dalam kegiatan investasi di suatu daerah untuk menarik modal ke daerah tersebut. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan setiap daerah untuk tumbuh, di sisi lain juga akan menciptakan perbedaan dalam kapasitas menghasilkan pendapatan. Investasi dianggap lebih menguntungkan jika dialokasikan ke daerah-daerah yang dapat menghasilkan keuntungan besar dalam waktu yang relatif singkat. Mekanisme pasar sebenarnya menciptakan ketimpangan, dengan daerah yang relatif maju tumbuh lebih cepat dan daerah kurang berkembang tumbuh relatif lambat. Hal inilah yang menyebabkan ketimpangan pendapatan antar daerah sehingga perlu

adanya perencanaan dan kebijakan yang mengarahkan alokasi investasi untuk pembangunan ekonomi yang lebih berimbang di seluruh wilayah tanah air (Sjafrizal, 2012).

Dengan kata lain investasi akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan meningkatnya investasi maka pertumbuhan ekonomi pun akan meningkat, seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut akan berimbas pada ketimpangan pendapatan, meningkatnya atau menurunnya investasi berhubungan erat dengan tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut yang mana menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya ketimpangan pendapatan.

Realitanya di Indonesia kondisi investasi di setiap provinsinya sangatlah timpang. Sebagian besar kegiatan investasi berpusat di pulau Jawa, hal tersebut dikarenakan pulau jawa merupakan pulau yang menjadi pusat perekonomian negara Indonesia, sehingga investor lebih tertarik menanamkan modalnya di pulau jawa. Akan tetapi pada kenyataannya justru nilai ketimpangan di pulau Jawa itu mendominasi nilai tertinggi, atau dengan kata lain distribusi pendapatannya tidak merata.

2.3.3 Hubungan Upah Minimum Provinsi dengan Ketimpangan Pendapatan

Institusional ekonom berpendapat bahwa upah minimum dapat mengurangi ketimpangan. Menurunnya upah minimum meredistribusikan pendapatan dengan menurunkan keuntungan perusahaan dan meningkatkan upah pekerja rendah. Maka, dengan menetapkan upah minimum maka standar upah akan lebih tinggi dan menciptakan distribusi upah dan pendapatan yang lebih adil (Nazamuddin, 2015).

Pengaruh negatif UMP terhadap ketimpangan pendapatan juga diperkuat oleh (Sanjaya, 2020) yang menjelaskan bahwa program pemerintah dalam menetapkan tingkat upah yang tidak jauh berbeda agar tidak terjadi ketimpangan pendapatan di daerah-daerah, program ini akan mengurangi ketimpangan penghasilan pekerja yang tentunya juga akan mengurangi angka ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat. Upah merupakan penghasilan dari pekerja yang merupakan bagian dari pendapatan rumah tangga dan memiliki kontribusi utama dalam mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan rumah tangga, yang selanjutnya akan mengurangi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan.

2.3.4 Hubungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan Ketimpangan Pendapatan

Teori Kuznet yang menjelaskan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan cenderung meningkat. Namun setelah mencapai titik tertentu, ketimpangan akan mulai menurun seiring dengan meningkatnya PDB atau PDRB. Nilai PDRB yang tinggi mencerminkan keberhasilan suatu wilayah dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dan yang tersedia sehingga dengan begitu dapat mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan.

Di setiap wilayah ataupun provinsi di Indonesia, sudah dipastikan memiliki nilai PDRB yang berbeda. Perbedaan tersebut yang dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan di setiap daerah. Teori keterkaitan sektoral menjelaskan bahwa daerah dengan industri yang lebih maju dan beragam akan cenderung memiliki ketimpangan yang lebih rendah. Akan tetapi bisa saja teori tersebut pada kenyataannya berbanding terbalik, karena meskipun PDRB memiliki pengaruh kuat

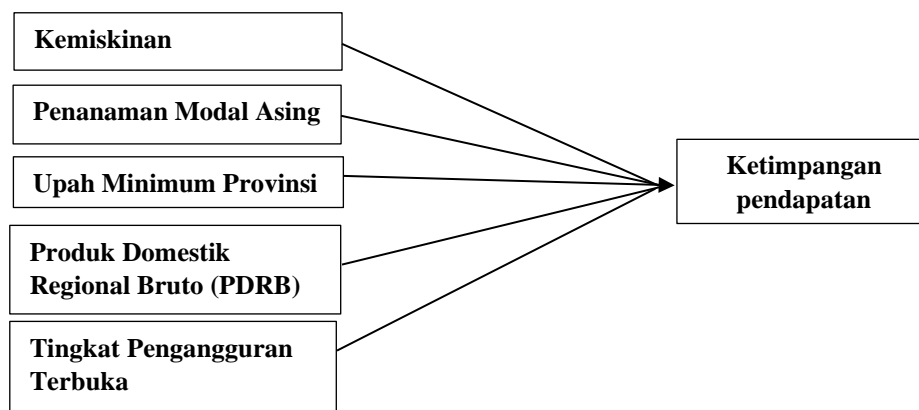
terhadap ketimpangan pendapatan, akan tetapi hubungan tersebut bisa positif maupun negative, tergantung keadaan faktor lainnya yang dapat mempengaruhi daerah tersebut.

2.3.5 Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Ketimpangan Pendapatan

(Mankiw, 2014) menjelaskan tentang pengangguran yang mana merupakan seseorang yang berhenti bekerja sementara atau sedang mencari pekerjaan. Seseorang yang menganggur tidak memperoleh pendapatan. Semakin besar pengangguran maka semakin banyak golongan tenaga kerja yang tidak mempunyai pendapatan. Dengan begitu, pengangguran yang semakin tinggi dapat menurunkan upah golongan berpendapatan rendah sehingga ketimpangan pendapatan akan menjadi semakin tinggi.

Selain itu juga, menurut (Sjafrizal, 2012) menjelaskan bahwa pengangguran menjadi salah satu parameter penting yang digunakan dalam mengukur tinggi rendahnya kesejahteraan Masyarakat daerah. Tingginya tingkat pengangguran membuktikan bahwa tingkat pendapatan dan kesejahteraan Masyarakat masih rendah, begitupun sebaliknya. Jadi, semakin tinggi pengangguran membuat semakin banyak tenaga kerja yang tidak memiliki pendapatan, karena akan menurunkan tingkat gaji golongan tenaga kerja yang berpendapatan rendah, akibatnya ketimpangan pendapatan meningkat. Selain itu, korelasi positif antara tingkat pengangguran dengan ketimpangan pendapatan juga diperkuat oleh studi (Sheng, 2011) dan (Haini, 2023).

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, secara jelasnya dapat dilihat dari gambar berikut:



2.3 Hipotesis

Berdasarkan permasalahan dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Diduga secara parsial kemiskinan, penanaman modal asing, dan tingkat pengangguran terbuka secara parsial berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan upah minimum provinsi, dan PDRB secara parsial berpengaruh negative terhadap ketimpangan pendapatan di 34 provinsi di Indonesia tahun 2018-2023.
- 2) Diduga secara simultan kemiskinan, penanaman modal asing, upah minimum provinsi, PDRB, dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di 34 provinsi di Indonesia tahun 2018-2023..